

PENGARUH TINGKAT KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA, TEKNOLOGI INFORMASI, PENGENDALIAN INTERN DAN PENGAWASAN KEUANGAN TERHADAP KEANDALAN PELAPORAN KEUANGAN KEPOLISIAN RESORT PROVINSI JAWA TIMUR

Iskharimah¹

Harmono²

Sihwahjoeni³

^{1,2,3}Universitas Merdeka Malang

*Korespondensi: iskharimah098@gmail.com

Abstract

The purpose of this research is to determine the competence of human resources, technology and information, internal control and financial control on the reliability of a financial report at the East Java Provincial Police. The type of this research is quantitative, the method used is the census method on members of the police who work as treasurers in the financial department of the East Java Police, of which there are 50 people as respondents, while the data analysis technique used is multiple linear regression. The research results found that HR competence had a significant effect on the reliability of financial reports at the East Java Police, technology and information had no effect on the reliability of financial reports at the East Java Police, internal control had a significant effect on the reliability of financial reports at the East Java Police.

Keywords: *Financial Supervision and Reliability of Police Financial Reporting; HR Competence; Information Technology; Internal Control.*

Abstrak

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk dapat mengetahui kompetensi sumber daya manusia, teknologi dan informasi, pengendalian intern dan pengendalian keuangan terhadap keandalan laporan keuangan pada Kepolisian Daerah Provinsi Jawa Timur. Jenis penelitian ini adalah kuantitatif, metode yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah metode sensus pada anggota kepolisian yang bekerja sebagai bendahara pada bagian keuangan Polda Jatim yang berjumlah 50 orang sebagai responden, sedangkan teknik analisis data yang digunakan adalah regresi linier berganda. Hasil penelitian menemukan bahwa kompetensi SDM berpengaruh signifikan terhadap keandalan laporan keuangan Polda Jatim, teknologi dan informasi tidak berpengaruh signifikan terhadap keandalan laporan keuangan Polda Jatim, pengendalian intern berpengaruh signifikan terhadap keandalan laporan keuangan di Polda Jatim.

Kata Kunci: *Kompetensi SDM; Pengawasan Keuangan dan Keandalan Pelaporan Keuangan Polri; Pengendalian Intern; Teknologi Informasi.*

PENDAHULUAN

Kantor Kepolisian Resort Provinsi Jawa Timur yaitu instansi pemerintah di bidang keamanan masyarakat Indonesia. Setiap kegiatan yang dilaksanakan memerlukan tunjangan anggaran dan untuk melancarkan proses pencairan anggaran dibutuhkan keandalan laporan keuangan. Keandalan Laporan Keuangan Kepolisian Resort Provinsi Jawa Timur mencerminkan pengelolaan atas bentuk pertanggungjawaban laporan keuangan yang terealisasi dalam satu tahun di instansi Kepolisian Resort Provinsi Jawa Timur dengan adanya penyajian informasi mengenai alokasi anggaran, penyebaran anggaran dan arus kas.

Peraturan Standar Akuntansi Pemerintah (PSAP) Tahun 2010 No 71 melaksanakan ketentuan pada pasal 1 ayat (3) yang mana menjelaskan bahwa SAP dalam penyajian laporan keuangan harus diterapkan prinsip dasar akuntansi untuk penyusunan di instansi pemerintah dan KPPN suatu instansi yang bekerja membuat dan memperbaiki hasil alokasi pencairan dana dari kas Negara pada laporan keuangan. Pertanggungjawaban laporan keuangan Negara di lingkungan Polri menuntut adanya suatu perubahan yang positif terhadap laporan pengelolaan dana yang dilatarbelakangi Peraturan Pemerintah. (Abdulrahman, 2014) menyatakan jika terjadi kesalahan mempertimbangkan keputusan dalam penempatan sumber daya manusia maka dapat memicu kerugian, kelemahan, dan tidak efisien sehingga berdampak pada karakteristik yang tidak sesuai pada laporan keuangan Kepolisian Resort Provinsi Jawa Timur.

(Anggriana, T. M., Kadafi, A., & Trisnani, 2017) menyatakan bahwa memutuskan sebuah keputusan untuk menilai akuntabilitas bertujuan dalam penyajian informasi yang bermanfaat terhadap laporan keuangan. Untuk mewujudkan tujuan dalam keandalan laporan keuangan Kepolisian Resort Provinsi Jawa Timur maka diperlukan peningkatan pelaksanaan dan kinerja dalam lingkungan kepolisian yang berdayaguna dan bertanggungjawab serta mewujudkan *good governance*. Sistem akuntabilitas memiliki ketentuan umum untuk diwajibkan dalam kerja berdasarkan peraturan nomor 29 tahun 2014 yang dibuat presiden republik Indonesia sehingga staf keuangan satuan kerja wajib menguasai di bidang administrasi dikarenakan kondisi laporan keuangan saat ini mencerminkan penggunaan anggaran untuk kegiatan yang dilaksanakan Anggota Kepolisian Resort Provinsi Jawa Timur.

Pertanggung jawaban dalam laporan keuangan Kepolisian Resort Provinsi Jawa Timur bertugas untuk menyiapkan laporan keuangan per semester dalam mempertanggungjawabkan keuangan yang diberikan wewenang dalam pencairan anggaran penunjang kegiatan dalam kepolisian. Program dasar yang digunakan untuk membuat laporan keuangan satuan kerja instansi dalam memanfaatkan Sistem Akuntansi yang berpedoman pada Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) yaitu membuat Laporan sesuai fakta, neraca, dan laporan atas catatan keuangan, merupakan ketentuan Peraturan nomor 22 tahun 2011 pada Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Kepolisian Resort Provinsi Jawa Timur mempertanggungjawabkan dalam penyelenggaraan institusi yaitu bentuk tanggungjawab kepada pemerintah dalam menyajikan laporan keuangan adalah kualitas kerja. Laporan keuangan dinyatakan andal apabila pengambilan keputusan memiliki karakteristik kualitatif yang sangat berkaitan adanya nilai informasi. (Ariesta, 2013) menyebutkan valid atau benarnya

informasi dapat dilihat seberapa tinggi memberikan keyakinan dan kesanggupan informasi terhadap keandalan. Kepolisian Resort Provinsi Jawa Timur dalam laporan keuangan dapat memberikan informasi secara transparan dan jelas untuk meningkatkan kepercayaan atau keyakinan penuh terhadap pihak-pihak yang mempunyai sebuah kepentingan dapat memperoleh data yang dijadikan acuan.

Faktor dalam kompetensi SDM, teknologi informasi, pengendalian intern dan pengawasan keuangan dapat mempengaruhi keandalan laporan keuangan. Kepala bidang keuangan Polda Jatim Kombes Pol Takwil Ichsan mengatakan pada bagian keuangan harus menguasai ilmu dibidang yang ditanganinya pada acara laporan verifikasi dan pencocokan data keuangan Satuan kerja dan Penyusunan keuangan saat laporan pertanggungjawaban terhadap Polda Jatim Semester I Tahun 2019. Sumber daya manusia wajib berkompeten dalam Pengoptimalisasian di bidang akuntansi sehingga haruslah bersumber daya yang cukup kompeten dan sesuai pada penempatan pegawai sehingga mampu menjalankan tugasnya agar memberikan informasi yang baik dan hasil yang bernilai dalam keandalan.

Setiap instansi menginginkan kompetensi sumber daya manusia pada unit kerja sesuai bidang keahliannya. Terjadinya kompetensi sumber daya manusia yang dipekerjakan untuk bagian keuangan di Kepolisian Resort Provinsi Jawa Timur tidak semuanya memiliki latar belakang pendidikan akuntansi. (Antika, 2018) mengemukakan kompetensi sumber daya manusia untuk mencapai tujuan harus dapat memanfaatkan kemampuan, keterampilan, konsep dalam kesempatan penggunaan alat yang dimiliki organisasi. Kompetensi sumber daya manusia di Kepolisian Resort Provinsi Jawa Timur tidak lepas berkaitan dengan teknologi informasi untuk mengerjakan laporan keuangan namun masih ada beberapa yang kurang atau belum terlalu mahir dalam mengoperasikan program Sistem Akuntansi Instansi (SAI). Sumber daya manusia pada pegawai instansi pemerintahan masih kurang memadai sehingga untuk menjamin *skill* diperlukan pelatihan (Nurul Hikma, 2020).

Mengatur keuangan menggunakan teknologi informasi sehingga diharapkan dapat mendukung keandalan laporan keuangan Kepolisian Resort Provinsi Jawa Timur perlu adanya pembekalan khusus seperti yang sudah di bahas oleh Kabid Keuangan Polda Jatim pada acara pencocokan data dan penyusunan laporan keuangan tahun 2019. Berdasarkan observasi awal di lapangan terdapat pegawai keuangan yang kurang mahir dalam penggunaan teknologi informasi. Teknologi dapat bermanfaat apabila kompetensi sumber daya pada bidang yang dijalankan mampu mengoperasikan dengan baik. Penggunaan teknologi dapat mengurangi kesalahan dalam proses data apabila dalam sumber daya diterapkan pengendalian intern. Berpengaruhnya teknologi sebagai alat yang lengkap untuk mendukung kecepatan, konsisten, amanah, dan ketepatan waktu dalam laporan keuangan menjadi andal (Sarkosi, 2019).

Faktor terpenting dalam tercapainya keandalan laporan keuangan salah satu yang harus diperhatikan adalah sebuah SPI. SPI yang baik dicerminkan terhadap laporan keuangan Kepolisian Resort di Provinsi Jawa Timur yaitu kelengkapan, kewajaran dan pelaporan keuangan tepat waktu dengan menggunakan metode yang digunakan oleh manajemen untuk menjamin kelayakan data dan aset perusahaan sesuai prosedur dalam kebijakan yang dilakukan. Pemberian opini hanya bisa dilakukan oleh Badan pemeriksaan keuangan (BPK) dikarenakan prinsip akuntansi yang diselenggarakan sudah memenuhi standar umum yang berlaku dengan baik.

Fenomena yang terjadi pada Kepolisian Resort Provinsi Jawa Timur atas kesadaran akan kelemahan pada sistem pengendalian di lingkungan kepolisian terhadap

laporan keuangan yang andal. (Fitriani, 2017) mengemukakan proses tindakan dan kegiatan yang dijadikan fondasi pembentuk lingkungan pengendalian dengan tujuan dan sasaran tercapainya instansi atau organisasi yang baik pada sumber daya manusia disebut sebagai bentuk pengendalian intern. Undang-undang menyebutkan dalam pasal 1 ayat 3 diselenggarakan pengendalian intern secara menyeluru di bidang keuangan polri pada satuan kerja sehingga ketentuan umum prinsip-prinsip yang digunakan di lingkungan Kepolisian Resort Provinsi Jawa Timur meliputi legalitas, prosedural, profesional, legitimasi, akuntabilitas, transparan, objektivitas, independen diperlukan adanya pengawasan keuangan terhadap keandalan laporan keuangan secara rutin berdasarkan peraturan nomor 18 tahun 2011 yang dibuat oleh kepolisian Negara republik indonesia. (Rustandi, A., Asyiril, A., & Hikma, 2020) mengungkapkan aktivitas yang dijalankan pimpinan setiap hari kepada pegawai diyakini dapat tercapainya proses yang integral pada tujuan organisasi apabila dilaksanakan pengawasan terhadap laporan keuangan.

Terjadinya keandalan apabila penyajian laporan dalam kondisi pengawasan yang kondisional sehingga sudah terjamin kualitasnya. Menyusun rencana untuk mendapatkan informasi kembali sehingga dapat menjadi acuan pada standar kinerja pengawasan keuangan. Jika sudah diterapkan pengawasan namun masih ditemukan adanya penyimpangan maka untuk menjamin sumber kualitas data memilih tindakan lebih memperketat pengawasan eksternal maupun internal. Untuk data yang terjadi penyimpangan segera dilakukan perbaikan agar tidak terjadi penyesatan informasi sehingga tujuan keandalan pada laporan keuangan tercapai dengan efektif dan efisien.

Ruang lingkup kepolisian mempunyai beberapa tingkatan pengawasan sesuai tingkatan tertinggi yang dimulai dari Mabes disebut Inspektorat Pengawasan Umum (ITWASUM) yang berfungsi sebagai pembantu pimpinan dan pelaksana staf yang bertanggungjawab kepada Waka sesuai dengan peraturan dan dibawa kendali Kapolri undang-undang nomor 21 tahun 2010. Inspektorat Pengawasan Daerah (ITWASDA) yang berada ditingkat daerah atau polda dilanjutkan dengan tingkat polres yang disebut WASRIK. Undang-undang Nomor 18 tahun 2011 menyatakan masalah analisis dilakukan secara independen sebagai evaluasi terhadap laporan keuangan yang andal sehingga ditanggungjawabkan oleh Kasat kerja pimpinan yang diberi amanah dalam program yang dilaksanakan oleh bagian keuangan kepolisian Negara untuk pengawasan dan pemeriksaan rutin.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia tahun 2014 nomor 192 dalam mengatur tentang Pengawasan Keuangan dan Pembangunan yang bertanggungjawab pada pemerintah penyelenggaraan urusan pengawasan Negara dibidang keuangan dan seluruh pembangunan. (Anwar, 2016) berpendapat pengawasan keuangan dan pembangunan mempunyai kerangka audit investigasi untuk mengatur kegiatan-kegiatan yang diduga mengandung penyimpangan dan tindak pidana korupsi. Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) pada tahun anggaran 2019 terdapat 20 Satuan Kerja (satker) dan BPK memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian karena dianggap sudah menjalankan prinsip akuntansi yang baik.

Pengawasan keuangan yang terjadi pada Kepolisian Resort Provinsi Jawa Timur saat ini mencerminkan kestabilan dalam keandalan laporan keuangan yang dilakukan secara rutin dan memperketat pengawasan terhadap pelaporan anggaran yang digunakan pada pelaksanaan kegiatan. (Hamzah, 2020), menyatakan bahwa sangat penting dengan adanya pengawasan intern dalam lingkungan kepolisian untuk tercapainya *good governance* dan *claeen government* yang mendukung untuk

transparan, bersih dari penyesatan, akuntabel, efektif serta efisien dan bebas dari KKN. Keadaan yang terjadi dalam pengawasan keuangan saat pelaporan keuangan mengakibatkan staf ketidakbebasan dalam menyusun laporan keuangan dan mencerminkan menurunnya semangat kerja apabila setiap hari dilakukan pengawasan keuangan.

Hipotesis Penelitian

Penelitian ini memperoleh rujukan dari beberapa penelitian yang sudah dilakukan. Sartika, D., & Yuliantoro, R. (2019). Meneliti Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi, dan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Keandalan Pelaporan Keuangan Pemerintah Desa Kabupaten Belitung Timu. Hasil penelitian ini secara parsial menunjukkan bahwa Kualitas Sumber Daya Manusia Berpengaruh Terhadap Keterandalan Pelaporan Keuangan, sedangkan Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Sistem Pengendalian Intern tidak berpengaruh terhadap Keterandalan Pelaporan Keuangan Daerah.

Susilatri, S., Azlina, N., & Fransiska, F. (2015). Meneliti Pengaruh Sumber Daya Manusia, Pengawasan Keuangan Daerah, Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komitmen Organisasi terhadap Keandalan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sumber daya manusia, Pengawasan Keuangan Daerah, pemanfaatan teknologi informasi dan komitmen organisasi berpengaruh secara parsial dalam keandalan pelaporan keuangan.

Laksana, P. B. (2016). Meneliti Pengaruh Kapasitas Sumber Daya Manusia, Pengendalian Intern Akuntansi, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Dan Pengawasan Keuangan Daerah Terhadap Keterandalan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah. Hasil penelitian ini secara parsial menunjukkan bahwa kapasitas sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi, dan pengawasan keuangan daerah berpengaruh terhadap keterandalan pelaporan keuangan daerah, sedangkan pengendalian intern akuntansi tidak berpengaruh terhadap keterandalan pelaporan keuangan daerah.

Hartati, W., & Desmiyawati, N. A. (2014). Meneliti Analisis Pengaruh Pajak dan Mekanisme Bonus terhadap Keputusan *Transfer Pricing*. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengawasan keuangan pada hakekatnya merupakan fungsi yang melekat pada *leader* atau *top* manajemen dalam setiap manajemen.

Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Keandalan Laporan Keuangan

Peran utama dalam keandalan pelaporan keuangan adalah kompetensi sumber daya yang bagus dan handal sehingga mampu maksimal dalam bekerja. Susilatri, S., Azlina, N., & Fransiska, F. (2015) melakukan penelitian ini untuk menunjukkan bahwa sumber daya manusia, Pengawasan Keuangan Daerah, pemanfaatan teknologi informasi dan komitmen organisasi berpengaruh secara parsial dalam keandalan pelaporan keuangan. Sesuai dengan kerangka model penelitian dan hasil-hasil penelitian terdahulu dapat dirumuskan hipotesis penelitian sebagai berikut:

H₁: Kompetensi sumber daya manusia berpengaruh signifikan terhadap keandalan laporan keuangan Kepolisian Resort Provinsi Jawa Timur

Teknologi Informasi Terhadap Keandalan Laporan Keuangan

Teknologi informasi dapat membantu mempersingkat waktu dalam menyampaikan laporan dan melancarkan proses penyusunan laporan apabila sumber daya manusianya memadai dalam skil yang di butuhkan. Sartika, D., & Yuliantoro, R.

(2019). Menunjukkan bahwa Kualitas Sumber Daya Manusia Berpengaruh Terhadap Keterandalan Pelaporan Keuangan, sedangkan Pemanfaatan Teknologi Informasi Dan Sistem Pengendalian Intern tidak berpengaruh terhadap Keterandalan Pelaporan Keuangan Daerah. Sesuai dengan kerangka model penelitian dan hasil-hasil penelitian terdahulu dapat dirumuskan hipotesis penelitian sebagai berikut:

H₂: Teknologi informasi berpengaruh signifikan terhadap keandalan laporan keuangan Kepolisian Resort Provinsi Jawa Timur

Pengendalian intern terhadap keandalan laporan keuangan

Menghindar terjadinya kesalahan dalam menyampaikan pelaporan keandalan dapat menjamin kevalidan data yang andal sehingga kepolisian resort menerapkan sistem pengendalian intern. Laksana, P. B. (2016). Penelitian ini secara parsial menunjukkan bahwa kapasitas sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi, dan pengawasan keuangan daerah berpengaruh terhadap keterandalan pelaporan keuangan daerah, sedangkan pengendalian intern akuntansi tidak berpengaruh terhadap keterandalan pelaporan keuangan daerah. Sesuai dengan kerangka model penelitian dan hasil-hasil penelitian terdahulu dapat dirumuskan hipotesis penelitian sebagai berikut:

H₃: Pengendalian intern berpengaruh signifikan terhadap keandalan laporan keuangan Kepolisian Resort Provinsi Jawa Timur

Pengawasan keuangan terhadap keandalan laporan

Pengawasan merupakan usaha yang sistematis untuk menetapkan standar kinerja, untuk membandingkan kinerja aktual dengan standar kinerja yang sudah ditetapkan, untuk mengetahui penyimpangan yang terjadi, dan untuk memperbaiki serta menjamin kompetensi sumber daya pemerintahan digunakan secara efektif dan seefisien mungkin untuk mencapai tujuan dari organisasi dalam hal ini pemerintah daerah. Hartati, W., & Desmiyawati, N. A. (2014). Penelitian ini menyatakan bahwa pengawasan keuangan pada hakekatnya merupakan fungsi yang melekat pada *leader* atau *top* manajemen dalam setiap manajemen. Sesuai dengan kerangka model penelitian dan hasil-hasil penelitian terdahulu dapat dirumuskan hipotesis penelitian sebagai berikut:

H₄: Pengawasan keuangan berpengaruh signifikan terhadap keandalan laporan keuangan Kepolisian Resort Provinsi Jawa Timur

METODE PENELITIAN

Rancangan Penelitian

Rancangan penelitian ini berupa *Explanatory research* yang menguji hubungan kualitas antara variabel dependen dengan independen melalui pengujian hipotesis yaitu pengaruh kompetensi sumberdaya manusia, teknologi informasi, pengendalian intern dan pengawasan keuangan terhadap keandalan pelaporan keuangan. Dilakukan melalui survey, dengan unit analisis Kepolisian Resort Provinsi Jawa Timur khususnya SDM bagian keuangan dan level manajemen tingkat menengah terkait pengendalian intern. Periode penelitian bulan Maret sampai Juli Tahun 2021,

Metode Pengambilan Data

Teknik pengumpulan data penelitian, menggunakan kuesioner yang dibagikan kepada responden berisikan daftar pertanyaan/pernyataan terkait keandalan laporan keuangan dengan proses mendatangi langsung pada kantor Kepolisian Resort Jawa

Timur dan menghadap pimpinan sumber daya untuk meminta izin penelitian yang dipengaruhi oleh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Teknologi Informasi, Pengendalian Intern dan Pengawasan Keuangan.

Populasi dan Sampel

Populasi dan sampel dalam penelitian ini yaitu staf anggota kepolisian yang berada pada bendahara satuan keuangan Kepolisian Resort Provinsi Jawa Timur yang berjumlah 40 orang. Pengambilan sampel pada riset adalah dengan teknik *sampling jenuh* (sensus) yang artinya bahwa seluruh anggota populasi yang akan dijadikan pada sampel yang ditetapkan adalah 5 orang responden pada bagian staf keuangan satuan kerja dari 6 Kepolisian Resort Provinsi Jawa Timur serta Kabupaten dan Kota dengan alasan pengambilan sampel berdasarkan kriteria sampel adalah lingkungan kepolisian yang mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) terhadap laporan keuangan TA 2019 dari BPK serta ketersediaan data yang ada yang bersumber dari pihak Kepolisian Resort Provinsi Jawa Timur.

a. Definisi Operasional Variabel

1. Keandalan Laporan Keuangan

(Hartati, W., & Desmiyawati, 2014) yang menyatakan bahwa berpedoman PP Tahun 2005 No 24 dalam indikator untuk menilai informasi keandalan yaitu:

1. Kewajaran (penyajian yang jujur)
2. Dapat diuji
3. Netralitas (Tidak Berpihak)
4. Sistematis Waktu
5. *Timelines* (kecepatan membuat dan frekuensi pelaporan)

2. Kompetensi Sumber Daya Manusia

Menurut (Renwarin, F. D., & Sumtaky, 2019) untuk mengukur variabel kapasitas sumber daya manusia menggunakan indikator adalah:

1. Tingkat Pendidikan Formal
2. Kualitas Pelatihan
3. Pengalaman Kerja

3. Teknologi Informasi

(Jurnali, T., & Supomo, 2002) Indikator yang digunakan adalah :

1. Pemanfaatan Perangkat
2. Pengelolaan Data Keuangan
3. Perawatan

4. Pengendalian Intern

Kegiatan yang dilakukan setiap hari oleh pimpinan dalam sistem pengendalian intern dan proses yang integral bertujuan untuk tercapainya keandalan, pengamanan asset peraturan perundang-undangan (PP 60 tahun 2008). Indikator yang digunakan adalah:

1. Lingkungan Pengendalian
2. Penilaian Resiko
3. Informasi dan Komunikasi
4. Pemisahan Tugas.

5. Pengawasan Keuangan

Sebagaimana diungkapkan oleh (Renwarin, F. D., & Sumtaky, 2019) yang menyatakan bahwa indikator yang digunakan untuk mengukur variabel pengawasan keuangan daerah adalah sebagai berikut:

1. Pengawasan Dokumen Bukti Transaksi
2. Pengawasan Pelaksanaan Tugas
3. Pengawasan Kegiatan dan Evaluasi
4. Pengawasan Laporan Sesuai Aturan

Metode Analisis

Pengujian Validitas dan Reliabelitas

Pengujian Asumsi Klasik

- a. Uji Heteroskedastisitas
- b. Uji Normalitas
- c. Uji Multikolinearitas

Analisis Regresi Linier Berganda

Sebagaimana dinyatakan oleh Supranto (CTATIONS Pa 12/1 1033), dengan menggunakan rumus dalam pengujian regresi linier berganda ialah :

$$Y = B_0 + B_1X_1 + B_2X_2 + B_3X_3 + B_4X_4 + e$$

Keterangan :

Y: Keandalan Laporan Keuangan

β_0 : nilai konstanta

$\beta_{(1,2,3,4)}$: Koefisien Regresi

X_1 : Kompetensi Sumber Daya Manusia

X_2 : Teknologi Informasi

X_3 : Pengendalian Intern

X_4 : Pengawasan Keuangan

e : Error

Pengujian Hipotesis

1. Uji Pengaruh simultan (Uji F) secara matematis untuk menjawab hipotesis yang ada dapat ditunjukkan dengan jenis persamaan di bawah ini :

$$F = \frac{R^2 (n - k - 1)}{k(1 - R^2)}$$

Keterangan :

F : Nilai hitung

R² : Koefisien determinasi

k : Banyak variabel yang diamati

n : Banyak sampel

Kriteria penerimaan untuk H_0 adalah : H_0 diterima apabila $F_{hitung} < F_{tabel}$ dan apabila H_0 ditolak $F_{hitung} > F_{tabel}$

2. Uji kebersamaan (Uji statistik t) dapat digunakan untuk dilakukan pengujian apakah pada variabel bebas dapat memberikan pengaruh secara parsial terhadap variabel terikat, serta dapat dilakukan perhitungan pada rumus (Santoso, 2013) :

$$t_1 = \frac{b_1}{Sb_j}$$

Keterangan :

T₁ : Nilai Uji

B_j : Koefisien regresi (slope kemiringan regresi)

S_{bj} : Standar eror koefisien regresi

Kriteria untuk penerimaan H_0 adalah :

H_0 diterima apabila $t_{tabel} < t_{hitung} < + t_{tabel}$ dan H_0 ditolak apabila $- t_{tabel} < t_{hitung}$, $t_{tabel} < t_{hitung}$.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Statistik Deskriptif

Tujuan dari hasil Uji *Descriptive Statistics* yang diolah menjadi tabel dibawah ini menunjukkan nilai Minimum, Maximum, Mean, dari variabel (X_1), (X_2), (X_3), dan (X_4) yang memberikan sebuah gambaran hubungan pada variabel dependen Keandalan Laporan Keuangan (Y). Hasil Uji *Descriptive Statistics* sebagai berikut:

Tabel 1
Descriptive Stastistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Keandalan Laporan Keuangan	40	4.00	5.00	4.5500	.50383
Kompetensi Sumber Daya Manusia	40	4.00	5.00	4.5250	.50574
Teknologi Informasi	40	3.50	5.00	4.4250	.54948
Pengendalian Intern	40	3.00	5.00	4.4075	.69807
Pengawasan Keuangan	40	2.50	5.00	4.2500	.86232
Valid N (Listwise)	40				

Sumber : Data Primer Yang Diolah, 2021

Sebagaimana hasil perhitungan pada tabel tersebut, sehingga yang didapat dari nilai N sebanyak 40 responden bagian keuangan Kepolisian Resort Provinsi Jawa Timur dilihat dari segi Keandalan Laporan Keuangan (Y) mempunyai nilai minimum sebesar 4.00, nilai maximum sebesar 5.00, dapat diartikan pernyataan yang mengindikasikan bahwa responden setuju atas keandalan laporan keuangan yang disajikan pada kepolisian resort Provinsi Jawa Timur.

Dapat dilihat dari analisis kewajaran memiliki arti bahwa penyajian secara wajar diharapkan dapat disajikan dalam bentuk gambar laporan keuangan yang jujur dengan penerapan seperti itu dapat diharapkan dalam laporan keuangan yang disajikan adalah penyajian yang jujur. Maka nilai mean yang diperoleh sebesar 4.5500 dan nilai *Standard Deviation* sebesar 0.50383. Begitu juga dengan variabel independen Kompetensi Sumber Daya Manusia (X_1) pada tabel diatas menunjukkan nilai minimum sebesar 4.00, yang diperkuat dalam nilai maksimum sebesar 5.00.

Menunjukkan bahwa bagian keuangan Kepolisian Resort Provinsi Jawa Timur tidak begitu penting terhadap tingkat pendidikan disebabkan responden mampu menjalankan tugas atau proses kegiatan keuangan meski pendidikan rata-rata menengah keatas karena di dalam ruang lingkup Kepolisian Resort Provinsi Jawa Timur adanya pelatihan kerja atau *training* guna dalam mengembangkan keahlian dalam tugas yang diberikan dan Pengalaman kerja yang professional memberi kemudahan dalam tugas yang diberikan diikuti dengan nilai *mean* sebesar 4.5250 dan nilai *Standard Deviation* sebesar 0.50574.

Teknologi Informasi (X_2) menyatakan pada nilai minimum sebesar 3.50, dan memperoleh nilai maksimum sebesar 5.00, yang artinya bagian keuangan Kepolisian Resort Provinsi Jawa Timur sangat yang secara tidak langsung akan merespon terhadap sebuah jaringan internet yang sudah dipasang pada beberapa bagian kinerja sehingga dapat memberikan sebuah kesempatan untuk melakukan pengaksesan data finansial secara efektif serta dapat tersedianya pada sebuah perangkat yang keras serta perangkat lunak pada sebuah komputer yang akan dibutuhkan pada bagian keuangan/akuntansi cukup untuk melaksanakan tugas. Sehingga adanya fasilitas yang mendukung staf bagian keuangan dapat menjadwalkan *backup* data yang dilakukan untuk menjaga file laporan keuangan yang rusak akibat perangkat. Dalam uraian itu maka nilai *mean* yang diperoleh sebesar 4.5250 dan nilai *Standard Deviation* sebesar 0.54948.

Pengendalian Intern (X_3) memperoleh nilai minimum sebesar 3.50, nilai maksimum sebesar 5,00, dalam pengendalian intern ini tidak mendukung jika kepala sub-bagian keuangan tidak merangkap jabatan karena saat terjadinya kegiatan mendesak yang melibatkan kekurangan personil pengamanan secara otomatis dilakukan penambahan personil secara acak. Namun dalam ruang lingkup kepolisian untuk informasi dan komunikasi dalam proses keuangan sangat tinggi dalam Informasi yang diberikan sudah sesuai dengan keandalan nilai informasi laporan keuangan.

Sistem informasi yang diterapkan dalam pelaksanaan tanggungjawab yang dapat menurunkan resiko dengan cara Instansi/lembaga telah membuat batas penentuan toleransi, menerapkan pengendalian intern dan manajemen terhadap resiko yang akan terjadi sehingga Instansi/lembaga telah menerapkan kode etik secara tertulis. Maka nilai *mean* yang diperoleh dalam pengendalian intern terhadap keandalan laporan keuangan Kepolisian Resort Provinsi Jawa Timur sebesar 4.5250 dan nilai *Standard Deviation* sebesar 0.69807 sehingga dapat dijelaskan jika nilai *mean* lebih besar dari nilai *Standard Deviation* yaitu terjadinya penyebaran nilai secara merata dan rendahnya nilai penyimpangan data.

Pengawasan Keuangan (X_4) dalam Kepolisian Resort Provinsi Jawa Timur sangat berpengaruh terhadap keandalan laporan keuangan maka dapat dijelaskan pada nilai minimum sebesar 2.50, nilai maksimum sebesar 5.00, yang artinya semua kegiatan dalam pengawasan keuangan sangat berpengaruh mulai dari dokumen bukti transaksi, pelaksanaan, kegiatan evaluasi, dan laporan sesuai aturan. Laporan keuangan yang disusun benar-benar telah dijalankan dengan sesuai dan telah dipertanggungjawabkan. Pernyataan ini sangat berpengaruh terhadap keandalan laporan keuangan sehingga staf keuangan selalu mengoreksi berulang-ulang untuk memastikan kevalidan data. Untuk nilai *mean* yang di peroleh sebesar 4.2500 dan nilai *Standard Deviation* sebesar 0.86232 sehingga dapat dijelaskan jika nilai *mean* lebih besar dari nilai *Standard Deviation* yaitu terjadinya penyebaran nilai secara merata dan rendahnya nilai penyimpangan data.

Hasil Uji Kualitas Data

Hasil Uji Validitas

Pertanyaan dapat dikatakan valid apabila hasil uji validitas menunjukkan angka valid. Dengan tujuan untuk dapat melihat data kuesioner pada sebuah kuesioner ini menggunakan uji validitas yaitu menghitung signifikan dengan diadakan sebuah perbandingan antara nilai T_{hitung} dengan nilai T_{tabel} . Dalam riset ini ada beberapa pedoman pada angka r tabel 38 dikarenakan jumlah responden 40 yang dihitung dengan rumus derajat kebebasan adalah $df = 40 - 2 = 38$ sehingga dapat dilihat pada r tabel

angka signifikan pada 38 yaitu sebesar 0,308 yang diambil pada tingkat signifikan sebesar 0,05, dapat disajikan dalam tabel berikut ini :

Tabel 2
Hasil Uji Validitas

Nama variabel	Item Pertanyaan	r hitung	r tabel	Keterangan
Keandalan laporan keuangan (Y)	KLK ₁	0,629	0,308	Valid
	KLK ₂	0,715	0,308	Valid
	KLK ₃	0,951	0,308	Valid
	KLK ₄	0,849	0,308	Valid
Kompetensi Sumber Daya Manusia (X ₁)	SDM ₁	0,814	0,308	Valid
	SDM ₂	0,801	0,308	Valid
	SDM ₃	0,738	0,308	Valid
Teknologi informasi (X ₂)	TI ₁	0,714	0,308	Valid
	TI ₂	1,000	0,308	Valid
	TI ₃	0,853	0,308	Valid
Pengendalian intern (X ₃)	PI ₁	1,000	0,308	Valid
	PI ₂	0,975	0,308	Valid
	PI ₃	0,904	0,308	Valid
	PI ₄	0,701	0,308	Valid
Pengawasan keuangan (X ₄)	PK ₁	1,000	0,308	Valid
	PK ₂	0,933	0,308	Valid
	PK ₃	0,627	0,308	Valid
	PK ₄	0,855	0,308	Valid

Sumber: data primer yang diolah, 2021

Dapat disimpulkan berdasarkan pada tabel tersebut, sehingga dapat dinyatakan bahwa uji validitas yaitu menerangkan bahwa pertanyaan pada variabel terikat dan variabel bebas dari instrumen terhadap variabel (Y), (X₁), (X₂), (X₃) serta (X₄) benar-benar valid dilihat dari besarnya angka r hitung melebihi r tabel.

Hasil Uji Reabilitas

Pengujian hasil uji reliabelitas pada riset ini dengan cara dibandingkan pada nilai cronbach Alpha > 0,70. Apabila pada nilai *cronbach Alpha* > 0,70 sehingga dapat dinyatakan bahwa data tersebut diandalkan atau dikenal dengan nama reliabel, oleh karena itu untuk pengujian reliabelitas dapat disajikan pada tabel berikut ini:

Tabel 3
Hasil Uji Reabilitas

Nama variabel	Item	Cronbach's Alpha (α)	Keterangan
Keterandalan laporan keuangan (Y)	Y1	0,862	Reliabel
	Y2	0,852	Reliabel
	Y3	0,825	Reliabel
	Y4	0,829	Reliabel
Kompetensi Sumber Daya Manusia (X ₁)	X1	0,967	Reliabel
	X2	0,964	Reliabel
	X3	0,963	Reliabel
Teknologi informasi (X ₂) Pengendalian intern (X ₃)	X1	0,964	Reliabel
	X2	0,961	Reliabel
	X3	0,962	Reliabel
	X1	0,960	Reliabel
	X2	0,960	Reliabel
	X3	0,963	Reliabel
	X4	0,966	Reliabel
Pengawasan keuangan (X ₄)	X1	0,965	Reliabel
	X2	0,965	Reliabel
	X3	0,964	Reliabel
	X4	0,966	Reliabel

Sumber : Data Primer Yang Diolah, 2021

Perhitungan hasil SPSS menunjukkan bahwa pengujian realibilitas pada tabel tersebut yang menyatakan reliabel pada N of items 4 divariabel terikat 0,876 yang lebih besar dari 0,70 *Cronbach Alpha* dan nilai pada variabel bebas sebesar 0,966 > 0,70 yang terdapat pada N of items 14 dikatakan reliabel.

Hasil Uji Asumsi klasik

Hasil Uji Normalitas

Analisis data yang dimasukkan keprogram SPSS untuk melihat hasil uji normalitas sehingga mendapatkan grafis penyebaran titik-titk. Titik-titik yang mana menyebar menghampiri pada sebuah garis diagonal, oleh karena itu dapat dinyatakan bahwa data yang digunakan dalam riset ini berdistribusi normal, oleh karena itu dapat disajikan pada grafik berikut ini :



Gambar 2

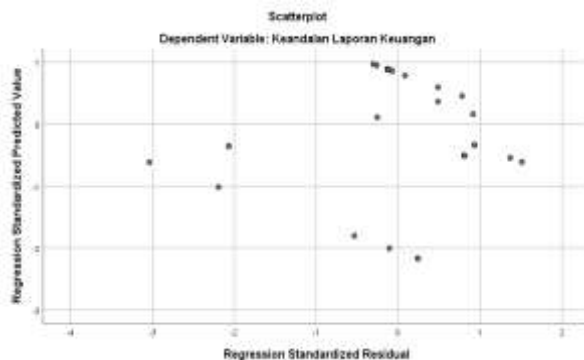
Hasil Uji Normalitas

Sumber : Data Primer Yang Diolah, 2021

Grafis diatas menunjukkan bahwa dalam riset tersebut memiliki informasi yang dimiliki berdasarkan dengan keuangan Kepolisian Resort Provinsi Jawa Timur adalah distribusi normal karena penyebaran titik-titik mendekati garis diagonal.

Hasil Uji Heteroskedastisitas

Pengamatan varian dari residual dilakukan dalam model regresi bertujuan untuk menguji kesamaan atau tidaknya dari pengamatan-pengamatan yang dilakukan. Uji heteroskedastisitas dikatakan signifikan apabila titik-titik menyebar tidak membentuk suatu pola dan berada diatas angka 0. Hasil uji heteroskedastisitas dapat disajikan pada grafik berikut ini :



Gambar 3

Hasil Uji Heteroskedastisitas

Sumber : Data Primer Yang Diolah, 2021

Scatter plot yang dihasilkan dari output SPSS dapat dilihat dari penyebaran titik yang diatas angka 0 dan uji heteroskedastisitas dapat disimpulkan apabila tidak memiliki pola yang membentuk dengan jelas dengan kata lain probabilitas signifikan dikarenakan titik yang menyebar diatas 0,05.

Hasil Uji Autokorelasi

Pengujian pada uji autokorelasi menyatakan bahwa mendeteksi adanya atau tidak autokorelasi oleh hasil uji *Durbin Watson*, dari penelitian terdahulu sebagai pedoman tidak terjadinya batas autokorelasi adalah apabila nilai *Durbin Watson* menunjukkan antara -2 sampai +2. Dapat dilihat hasil *Derbin Watson* pada tabel berikut :

Tabel 4
Hasil Uji Autokorelasi
Model Summary

Model	<i>Derbin- Watson</i>
1	1.560

Sumber : Data Primer Yang Diolah, 2021

Hasil Uji *Durbin Watson* yang di hasilkan dari uji regresi menyatakan sebesar 1,560 oleh karena itu dapat dinyatakan bahwa model uji autokorelasi tidak menunjukkan terjadinya autokorelasi dikarenakan hasil *Durbin Watson* sebesar 1,560 yang berada ditengah-tengah -2 dan +2. Sesuai dengan pernyataan (Ghozali, 2013) yang menyatakan bahwa berdasarkan pada sebuah model regresi yang baik terdapat hubungan kesalahan dalam pengganggu pada periode T serta sebuah kesalahan pengganggu pada periode T-1.

Hasil Uji Multikolinieritas

Penelitian ini menerangkan uji multikolinieritas adalah variabel bebas yang tidak terjadi multikolinieritas dengan pedoman nilai *tolerance* dan nilai VIF, dapat dikatan variabel bebas tidak terjadi kolerasi dengan variabel lainnya apabila pada nilai *tolerance* > 0,10 serta pada nilai VIF <10, sehingga dengan kesimpulannya ialah ditabelkan sebagai berikut:

Tabel 5
Hasil Uji Multikolinieritas

Nama variabel	Tolerance	VIF	Keterangan
Kompetensi Sumber Daya Manusia (X_1)	0,097	10,317	Terjadi multikolinieritas
Teknologi informasi (X_2)	0,117	8,511	Tidak terjadi multikolinieritas
Pengendalian intern (X_3)	0,102	9,815	Tidak terjadi multikolinieritas
Pengawasan keuangan (X_4)	0,128	7,803	Tidak terjadi multikolinieritas

Sumber : Data Primer Yang Diolah, 2021

Terdapat empat variabel bebas pada penelitian ini namun Ketiga variabel bebas pada riset ini menunjukkan nilai toleransi lebih besar dibandingkan dengan 0,10 serta

VIF lebih kecil dari 10, sehingga dengan kesimpulannya ialah sama sekali tidak terjadinya multikolinieritas, variabel yang pertama menunjukkan nilai *tolerance* lebih kecil dari 0,10 dan lebih besar pada nilai VIF yaitu 10.

Analisis Regresi

Tujuan dari analisa regresi linier berganda ialah untuk dapat mengetahui pengaruh antar variabel bebas terhadap variabel terikat. Setelah data diperoleh dan diolah dengan SPSS memberikan hasil metode analisis regresi linear sebagai berikut :

Tabel 6
Regresi Berganda

Model	Unstandardized Coefficients	
	B	Std. Error
(Constant)	1.754	.254
Kompetensi Sumber Daya Manusia	.440	.166
Teknologi Informasi	.014	.138
Pengendalian Intern	.451	.137
Pengawasan Keuangan	-.251	.114

Sumber : Data Primer Yang Diolah, 2021

Sebagaimana pada hasil analisa pada tabel tersebut, sehingga dapat dinyatakan bahwa persamaan regresi sebagai berikut :

$$Y = \alpha + \beta X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 X_4 + e$$

$$KLP = 1,754 + 0,440X_1 + 0,014X_2 + 0,451X_3 + (-0,251)X_4 + 0$$

Hasil persamaan regresi linear menjelaskan tentang hubungan variabel dependen yaitu Keandalan Laporan Keuangan (Y) dipengaruhi oleh variabel bebas ialah (X_1), (X_2), (X_3), serta (X_4) berpengaruh negatif, dimana dijelaskan sebagai berikut:

1. Hasil konstan variabel dependen keandalan laporan keuangan (Y) dari penelitian tersebut menunjukkan nilai sebesar 1,754 yang dapat diartikan berpengaruh variabel bebas (X_1), (X_2), (X_3) serta (X_4).
2. Kompetensi SDM (X_1) memiliki nilai koefisien sebesar 0,440. Yang artinya SDM berpengaruh terhadap keandalan laporan keuangan. Pengaruh yang positif ini menunjukkan bahwa apabila Kompetensi SDM ditingkatkan 1 satuan sehingga mampu memaksimalkan pada sebuah keandalan laporan keuangan sebesar 0,440 satuan.
3. Teknologi serta informasi (X_2) mempunyai nilai koefisien sebesar 0,014. Yang artinya bahwa teknologi informasi tidak berpengaruh terhadap keandalan laporan keuangan. Pengaruh yang positif ini menunjukkan bahwa apabila teknologi informasi ditingkatkan 1 satuan maka adanya teknologi informasi maupun tidak ada teknologi informasi dalam pembuatan laporan keuangan tidak menghambat pada keandalan laporan keuangan sebesar 0,014 satuan.
4. Pengendalian Intern (X_3) memiliki nilai koefisien sebesar 0,451. Yang artinya Pengendalian intern berpengaruh terhadap peningkatan keandalan laporan keuangan. Pengaruh yang positif ini menunjukkan bahwa apabila pengendalian intern ditingkatkan 1 satuan akan mampu meningkatkan keandalan laporan keuangan sebesar 0,451 satuan.

5. Pengawasan Keuangan (X_4) memiliki nilai koefisien sebesar -0,251. Yang artinya pengawasan keuangan berpengaruh terhadap keandalan laporan keuangan. Pengaruh yang negatif ini menunjukkan bahwa apabila pengawasan keuangan ditingkatkan 1 satuan maka mampu menurunkan keandalan laporan keuangan sebesar -0,251 satuan.

Dapat dilihat dari penjelasan diatas bahwa ketiga variabel independen menunjukkan kenaikan jika variabel dependen dinaikkan 1 satuan skor. Dari ketiga variabel yang paling besar nilai kenaikan terdapat pada variabel Pengendalian Intern dan jika dari variabel Pengawasan Keuangan dinaikkan 1 satuan skor maka keandalan laporan keuangan terjadi penurunan.

Hasil Uji Simultan (Uji F)

Pengaruh variabel Kompetensi SDM, Teknologi Informasi, Pengendalian Intern, Pengawasan Keuangan yang dilakukan uji ketepatan model terhadap Keandalan Laporan Keuangan diukur menggunakan uji simultan atau uji F. Pengujian dilakukan dengan membandingkan antar F hitung serta F tabel serta melihat signifikansinya menggunakan hipotesis:

Ho : Secara uji ketepatan model kompetensi sumber daya manusia, teknologi informasi, pengendalian intern, pengawasan keuangan berpengaruh terhadap keandalan laporan keuangan.

Ha : Secara uji ketepatan model SDM, teknologi informasi, pengendalian intern, pengawasan keuangan tidak berpengaruh terhadap keandalan laporan keuangan.

Tabel 7
Uji Kleayakan Model (Uji F)

ANOVA ^a						
Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	4.704	4	1.176	43.447	.000 ^b
	Residual	.947	35	.027		
	Total	5.652	39			
a. Dependent Variable: Keandalan Laporan Keuangan						
b. Predictors: (Constant), Pengawasan Keuangan, Teknologi Informasi, Pengendalian Intern, Kompetensi Sumber Daya Manusia						

Sumber : Data Primer Yang Diolah, 2021

Hasil yang dapat diuraikan dari uji simultan yaitu tingkat signifikan sebesar 0,000 > 0,05 bahwa uji model ketepatan variabel (X_1), (X_2), (X_3) serta (X_4) berpengaruh signifikan terhadap (Y). Diketahui F_{tabel} variabel ini sebesar 2,63 dan f_{hitung} sebesar 43,447 sehingga dapat disimpulkan H_0 diterima dan H_a ditolak sebagai pembuktian lebih kuat adanya F_{hitung} lebih besar dari f_{tabel} yaitu sebesar 43,447 > 2,63.

Hasil Uji Parsial (Uji t)

Pada variabel (X_1), (X_2), (X_3), (X_4) dari masing-masing variabel independen tersebut dapat dilihat pengaruh secara parsial terhadap variabel (Y), sehingga menghasilkan hasil uji parsial dimasing-masing variabel independen sebagai berikut :

Tabel 8
Hasil Uji Parsial (Uji t)

Model		Standardized Coefficients	T	Sig.
		Beta		
1	(Constan)		6.916	.000
	Kompetensi sumber daya manusia	.590	2.654	.012
2	Teknologi informasi	.021	.104	.918
3	Pengendalian intern	.713	3.290	.002
4	Pengawasan keuangan	-.427	-2.208	.034

Sumber : Data Primer Yang Diolah, 2021

Pengujian variabel bebas (X_1) dengan variabel dependen Keandalan Laporan Keuangan Kepolisian Resort Provinsi Jawa Timur diperoleh nilai t_{tabel} sebesar 2.024 dan tingkat *Level Of Significant* (α) sebesar 0,05, sehingga dapat dijelaskan dari perbandingan antara nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$ dan nilai sig. $< Level Of Significant$ (α) maka H_0 ditolak dan H_1 diterima. Begitu juga sebaliknya jika nilai $t_{hitung} < t_{tabel}$ dan nilai sig. $> level of significant$ (α) maka H_0 diterima dan H_1 ditolak.

Hasil dan Pembahasan Hasil Penelitian

Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Keandalan Laporan Keuangan Kepolisian Resort Provinsi Jawa Timur

Nilai sig yang diperoleh dari variabel Kompetensi SDM pengaruhnya terhadap kendalan laporan keuangan sebesar 0.012 maka nilai Sig. $< (\alpha)$ ($0.012 < 0.05$) yang artinya bahwa H_0 ditolak sedangkan H_1 diterima. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa pada hipotesis pertama (X_1) memberikan pengaruh yang signifikan terhadap (Y), yang artinya hipotesis pertama diterima.

Berdasarkan hasil pengujian tersebut sehingga dapat menunjukkan bahwa variabel (X_1) terhdap keandalan laporan keuangan. Kemahiran dasar tingkat pendidikan staf keuangan yang sebagian besar merupakan lulusan S1 dan S2 telah mengikuti pelatihan dengan waktu pelatihan dan aktivitas pelatihan serta pengalaman kerja dibidangnya. Sehingga mereka dapat menyusun laporan keuangan yang handal dan laporan keuangan yang dapat disajikan secara tepat waktu, disajikan secara wajar dan dapat diuji. Hasil pengujian sejalan dengan teori yang dikemukakan oleh (Azhar, I. N., Maulana, I., & Lubis, 2021), (Darwanis, D., & Mahyani, 2009) menyatakan bahwa kompetensi SDM memberikan berpengaruh terhadap keandalan laporan keuangan. Riset ini juga sejalan dengan (S. D. Laksana, 2016) bahwa SDM berpengaruh signifikan terhadap keterandalan pelaporan keuangan. Keandalan laporan keuangan yang disajikan kepolisian resort Provinsi Jawa Timur selanjutnya dapat dipengaruhi oleh kompetensi sumber daya manusia. Tidak sejalan oleh riset Putri at all (2020) menyatakan kompetensi sumber daya manusia tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan.

Pengaruh Teknologi Informasi Terhadap Keandalan Laporan Keuangan Pada Kepolisian Resort Provinsi Jawa Timur

Nilai sig yang diperoleh dari variabel teknologi informasi pengaruhnya terhadap keandalan laporan keuangan sebesar 0.012 maka nilai Sig. $< (\alpha)$ ($0.012 < 0.05$) yang artinya bahwa H_0 ditolak sedangkan H_1 diterima. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa pada hipotesisi kedua (X_2) memberikan pengaruh yang signifikan terhadap (Y), yang artinya hipotesis kedua diterima.

Hasil pengujian menyatakan bahwa X_2 tidak berpengaruh terhadap Y. Penggunaan teknologi tidak dilakukan sejak awal pada proses laporan keuangan dan tidak didukung laporan menggunakan sisten teknologi informasi sehingga pengelola data keuangan sedikit terlambat. Adanya penyajiannya keterlambatan penggunaan sistem teknologi informasi mengenai data yang mempengaruhi penyajian dan keandalan laporan keuangan.

Hasil penelitian ini sejalan dengan teori (Yosefrinaldi, 2013) sistem yang menggunakan komputer membutuhkan waktu lama untuk pengaturan programnya. Jika operator tidak bisa mengoperasikan maka terjadi kerusakan sistem dan berdampak tidak kondisionalnya kinerja. (Sartika, D., & Yulianto, 2019), (Zulkardi, Z., Putri, R. I. I., & Wijaya, 2020) menyatakan bahwa pemanfaatan teknologi informasi tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan. Berbeda dari penelitian (Oktarini, D., Suyatno, S., & Yani, 2017) menyatakan bahwa pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh terhadap keandalan laporan keuangan.

Pengaruh Pengendalian Intern Terhadap Keandalan Laporan Keuangan Pada Kepolisian Resort Provinsi Jawa Timur

Nilai sig. yang diperoleh dari variabel (X_3) sebesar 0.002 maka nilai Sig. < (a) ($0.002 < 0.05$) artinya H_0 ditolak dan H_3 diterima. Dengan demikian hipotesis ketiga yang menyatakan bahwa Pengendalian intern Berpengaruh signifikan Terhadap Keandalan Laporan Keuangan Kepolisian Resort Provinsi Jawa Timur diterima.

Hasil pengujian menunjukkan bahwa pengendalian intern berpengaruh terhadap keandalan laporan keuangan. Pengendalian intern dalam penelitian ini sangat penting perannya dalam keandalan laporan keuangan kepolisian resort Provinsi Jawa Timur sehingga staf bagian keuangan kepolisian mengutamakan informasi dan komunikasi dalam melaksanakan tugas dan kewajiban untuk mengendalikan lingkungan keuangan sehingga dapat menekan resiko yang terjadi saat proses menyajikan laporan keuangan.

Hasil pengujian sejalan dengan teori yang dikemukakan oleh (Wardani, D. K., & Andriyani, 2017), (Sari, 2019) bahwa sistem pengendalian intern berpengaruh terhadap keandalan laporan keuangan. Penelitian ini juga sejalan dengan Azlan et all (2015) bahwa pengendalian intern berpengaruh signifikan terhadap keterandalan pelaporan keuangan. Keandalan laporan keuangan yang disajikan kepolisian resort provinsi jawa timur selanjutnya dapat dipengaruhi oleh pengendalian intern yang mengendalikan lingkungan dan tingkat resiko yang terjadi dalam penyajian atau keandalan laporan keuangan. Bertolak dari penelitian ini yang tidak sejalan dalam penelitian (Laksana, G. B. A., Putra, G. P. S. S., Jayantara, P. M., & Badriyah, 2019) menyatakan pengendalian intern tidak berpengaruh terhadap keandalan laporan keuangan.

Pengaruh Pengawasan Keuangan Terhadap Keandalan Laporan Keuangan Pada Kepolisian Resort Provinsi Jawa Timur

Nilai sig. yang diperoleh dari variabel (X_4) 0.034 maka nilai Sig. < (a) ($0.034 < 0.05$) artinya H_0 ditolak dan H_1 diterima. Dengan demikian hipotesis keempat yang menyatakan bahwa Pengawasan Keuangan Berpengaruh signifikan Terhadap Keandalan Laporan Keuangan Kepolisian Resort Provinsi Jawa Timur diterima.

Hasil pengujian menunjukkan bahwa pengawasan keuangan berpengaruh terhadap keandalan laporan keuangan. Pengawasan keuangan sangat penting pada

proses pelaporan keuangan sehingga adanya pimpinan melakukan peninjauan langsung dengan tujuan mengurangi resiko kelalaian dalam pencatatan laporan keuangan dan dapat dikatakan benar-benar valid, efektif serta efisien dalam keandalan laporan keuangan. Namun semakin ketatnya pengawasan maka dapat terjadi menurunnya keandalan laporan keuangan dikarenakan tidak dapat konsentrasi dengan leluasa sebab adanya perasaan tidak nyaman, tertekan, tergesa-gesa dan tegang.

Hasil pengujian sejalan dengan teori yang dikemukakan oleh (Ramadhani, F., Desmiyawati, D., & Kurnia, 2016) bahwa pengawasan keuangan pada kewajiban yang dimiliki seseorang manajer dalam prinsip manajemen. Penelitian ini juga sejalan dengan (P. B. Laksana, 2016), (Susilatri, S., Azlina, N., & Fransiska, 2015) bahwa sistem pengawasan keuangan berpengaruh terhadap keandalan laporan keuangan. Keandalan laporan keuangan yang disajikan Kepolisian Resort Provinsi Jawa Timur selanjutnya dapat dipengaruhi oleh pengendalian intern yang mengendalikan lingkungan dan tingkat resiko yang terjadi dalam penyajian atau keandalan laporan keuangan. Bertolak dari penelitian ini yang tidak sejalan dalam penelitian (P. B. Laksana, 2016), menyatakan pengendalian intern tidak berpengaruh terhadap keandalan laporan keuangan.

SIMPULAN, KETERBATASAN DAN SARAN

Simpulan

Sebagaimana pada hasil riset serta pembahasan tersebut, sehingga kesimpulan yang akan diambil dalam riset ini ialah :

1. Kompetensi SDM berpengaruh terhadap keandalan laporan keuangan Kepolisian Resort Provinsi Jawa Timur sehingga dapat dijelaskan, yang artinya bahwa apabila kompetensi SDM semakin efektif maka secara tidak langsung tingkat keandalan pada sebuah laporan keuangan pada Kepolisian Resort Provinsi Jawa Timur pun semakin efektif.
2. Teknologi dan informasi tidak berpengaruh terhadap keandalan laporan keuangan kepolisian Resort Provinsi Jawa Timur sehingga dapat dijelaskan, yang artinya bahwa apabila teknologi dan informasi semakin tidak efektif maka secara tidak langsung tingkat keandalan pada sebuah laporan keuangan pada Kepolisian Resort Provinsi Jawa Timur pun tidak efektif.
3. Pengendalian internal berpengaruh terhadap keandalan laporan keuangan kepolisian Resort Provinsi Jawa Timur sehingga dapat dijelaskan, yang artinya bahwa apabila pengendalian internal semakin efektif maka secara tidak langsung tingkat keandalan pada sebuah laporan keuangan pada Kepolisian Resort Provinsi Jawa Timur pun efektif.
4. Pengawasan Keuangan berpengaruh terhadap Keandalan Laporan Keuangan Kepolisian Resort Provinsi Jawa Timur sehingga dapat dijelaskan bahwa semakin sering diadakan Pengawasan Keuangan maka semakin mengurangi tingkat keandalan laporan keuangan Kepolisian Resort Provinsi Jawa Timur.

Keterbatasan

Berbeda dari pembahasan hasil penelitian ini dan penelitian ini jauh lebih banyak lagi pada kekurangan serta sama sekali masih jauh dari sebuah kesempurnaan, akan tetapi sudah berupaya untuk mengembangkan penelitian ini sehingga penelitian ini

mempunyai keterbatasan dan kelemahan dalam menyempurnakan penelitian yang dibuat. Berikut ini beberapa keterbatasan yang dimiliki peneliti:

1. Kurangnya Sampel data yang didapat dari seluruh staf keuangan Kepolisian Resort Provinsi Jawa Timur dikarenakan bersamaan dengan kegiatan dari instansi kepolisian sehingga ada yang tidak dapat mengisi kuesioner.
2. Sedikitnya akses data mengenai informasi laporan keuangan kepolisian pada pemerintahan membuat peneliti kekurangan pengembangan pada penelitian ini.
3. Tidak adanya wawancara secara langsung dengan staf keuangan Kepolisian Resort Provinsi Jawa Timur sehingga tidak dapat mengetahui dengan jelas sesuai keadaan.

Saran Untuk Penelitian Selanjutnya

Saran yang dapat diberikan peneliti untuk kedepannya dari keterbatasan yang dimiliki antara lain:

1. Walaupun dengan pengalaman yang sudah mahir dan masa kerja yang lama maka semakin bagus kompetensi sumber daya manusia jika pendidikan formal ditingkatkan sehingga menambah ilmu dan wawasan dengan luas.
2. Saran untuk pihak Kepolisian Resort Provinsi Jawa Timur agar meningkatkan kinerja yang menggunakan Teknologi Informasi sehingga dapat meringankan staf yang bekerja dibidang keuangan dan terhadap Pengawasan Keuangan dapat disesuaikan agar tidak terjadi menurunnya kinerja saat ada pengawasan di laporan keuangan sehingga dapat maksimal kinerja staf keuangan. Keandalan Laporan keuangan pemerintah dapat mengakses sedikit luas data laporan keuangan yang bersifat umum agar dapat mempermudah penelitian selanjutnya dan memberikan informasi mengenai laporan keuangan.
3. Perlu adanya peningkatan pengendalian intern untuk mencegah terjadinya masalah dan mengurangi tingkat resiko meski dalam lingkungan Kepolisian Resort Provinsi Jawa Timur sudah menjalankan pengendalian intern lebih baik lagi jika ditingkatkan kembali.
4. Untuk pengawasan keuangan agar ditingkatkan kembali sebab setiap dilakukan pengawasan kinerja staf keuangan menurun dan itu dapat mempengaruhi keandalan laporan keuangan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdulrahman, et. a. (2014). Realtionship between stress and eating Habits among nursingstudent in Assiut. *Med J Cairo Univ*, 82(2, September), 47–55.
- Anggriana, T. M., Kadafi, A., & Trisnani, R. P. (2017). *Peran konselor dalam meningkatkan keterampilan sosial siswa difabel. In Prosiding Seminar Nasional Hasil Penelitian LPPM Universitas PGRI Madiun*. 146–151.
- Antika, F. (2018). Pengaruh Fasilitas Dan Pengembangan Sumber Daya Insani Terhadap Produktivitas Kerja Karyawan Bank Syariah Mandiri (Studi Pada Karyawan Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Teluk Betung Bandar Lampung). *Doctoral Dissertation, UIN Raden Intan Lampung*.
- Anwar, I. (2016). Wewenang Auditor Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPK) Mengungkap Kerugian Negara dalam Tindak Pidana Korupsi di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah (POLDA) Sulawesi Selatan. *Jurnal Ilmu Hukum Kyadiren*, 1(1), 54–66.

- Ariesta, F. (2013). Pengaruh Kualitas Sumberdaya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Dan Pengendalian Intern Akuntansi Terhadap Nilai Informasi Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Di Kabupaten Pasaman Barat). *Jurnal Akuntansi*, 1(1).
- Azhar, I. N., Maulana, I., & Lubis, S. I. S. (2021). Pengaruh Transparansi Dan Akuntabilitas Terhadap Pengelolaan Sumber Daya Manusia. *Jurnal Education And Development*, 9(1), 520–520.
- Darwanis, D., & Mahyani, D. D. (2009). Pengaruh Kapasitas Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Tehnologi Informasi Dan Pengendalian Intern Akuntansi Terhadap Keterandalan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah. *Urnal Telaah Dan Riset Akuntansi*, 2(2), 133–151.
- Fitriani, A. (2017). Pengaruh Komitmen Pimpinan dan Lingkungan Pengendalian Internal Terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Survei Pada SKPD Provinsi Sulawesi Tengah). *Katalogis*, 5(4).
- Ghozali, I. (2013). *Aplikasi Analisis Multivariat dengan Program IBM SPSS* (Edisi 7). Penerbit Universitas Diponegoro.
- Hamzah, A. (2020). Wewenang Inspektorat Pengawasan Daerah Polda Dalam Pencegahan Tindak Pidana Korupsi Di Kepolisian Daerah Sulawesi Tengah Author Inspectorate Authoritors For Prevention Of Criminal Actions In Corruption In Regional Support Central Sulawesi. *Tadulako Master Law Journal*, 4(1), 1–24.
- Hartati, W., & Desmiyawati, N. A. (2014). Analisis Pengaruh Pajak dan Mekanisme Bonus terhadap Keputusan Transfer Pricing. *Jurnal Akutansi Dan Investasi*, 18, 1–18.
- Jurnali, T., & Supomo, B. (2002). Pengaruh Faktor Kesesuaian Tugas-Teknologi dan Pemanfaatan TI terhadap Kinerja Akuntan Publik. *The Indonesian Journal of Accounting Research*, 5(2).
- Laksana, G. B. A., Putra, G. P. S. S., Jayantara, P. M., & Badriyah, S. (2019). Evaluasi Penerapan Sistem Pengendalian Intern Dalam Penatausahaan Piutang Perpajakan Yang Berdampak Pada Laporan Keuangan Pemerintah Pusat. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Humanika*, 7(2).
- Laksana, P. B. (2016). Pengaruh Kapasitas Sumber Daya Manusia, Pengendalian Intern Akuntansi, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Dan Pengawasan Keuangan Daerah Terhadap Keterandalan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris Pada Dppkad Kabupaten Sukoharjo). *Doctoral Dissertation, Universitas Muhammadiyah Surakarta*.
- Laksana, S. D. (2016). Urgensi Pendidikan Karakter Bangsa di Sekolah. *MUADDIB: Studi Kependidikan Dan Keislaman*, 5(2), 167–184.
- Nurul Hikma, N. U. R. U. L. (2020). Pengaruh Pelaksanaan Sistem Full Day School Terhadap Prestasi Belajar Pendidikan Agama Islam Siswa Sdn 361 Bailing Kec. Bajo Barat Kab. Luwu. *Doctoral Dissertation, Institut Agama Islam Negeri (IAIN Palopo*.
- Oktarini, D., Suyatno, S., & Yani, A. V. (2017). Studi Pembuatan Kuah Laksan Instan Dengan Perbandingan Bubuk Santan Dan Udang Rebon Sungai. *Edible: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Teknologi Pangan*, 6(1), 46–50.
- Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2011 pada Kepolisian Negara Republik Indonesia tentang Sistem Akuntansi yang berpedoman pada Standar Akuntansi Pemerintah (SAP).

- Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
Peraturan Pemerintah (PP) No. 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia tahun 2014 nomor 192 Tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan.
- Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
- Ramadhani, F., Desmiyawati, D., & Kurnia, P. (2016). Pengaruh Ukuran Perusahaan, Profitabilitas, Leverage Dan Ukuran Dewan Pengawas Syariah Terhadap Pengungkapan Islamic Social Reporting (Studi Empiris Pada Bank Umum Syariah di Indonesia Tahun 2010-2014). *Doctoral Dissertation, Riau University*.
- Renwarin, F. D., & Sumtaky, M. (2019). Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi ketepatan waktu penyajian laporan keuangan pada satuan kerja perangkat daerah pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara. *Jurnal Ulet (Utility, Earning and Tax)*, 3(2), 41–55.
- Rustandi, A., Asyiril, A., & Hikma, N. (2020). Pengembangan media pembelajaran berbasis android pada mata pelajaran simulasi dan komunikasi digital kelas x sekolah menengah kejuruan teknologi informasi airangga tahun ajaran 2020/2021. *Media Bina Ilmiah*, 15(2), 4085–4092.
- Santoso, S. (2013). *Stasistika Ekonomi plus Aplikasi SPSS*. Umpo Press.
- Sari, R. P. (2019). Determinan Keandalan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pada Skpd Kabupaten Kulonprogo. *Accounting Global Journal*, 3(2), 118–137.
- Sarkosi, E. (2019). Aplikasi Go Sigap sebagai wujud peningkatan pelayanan publik yang lebih mudah bagi masyarakat dengan berbasis teknologi informasi. *Jurnal Sosiologi Dialektika*, 14(1), 84–94.
- Sartika, D., & Yuliantoro, R. (2019). Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi, dan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Keandalan Pelaporan Keuangan Pemerintah Desa Kabupaten Belitung Timu. *Doctoral Dissertation, Universitas Ahmad Dahlan*.
- Susilatri, S., Azlina, N., & Fransiska, F. (2015). Pengaruh Sumber Daya Manusia, Pengawasan Keuangan Daerah, Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komitmen Organisasi terhadap Keandalan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Labuhan Batu). *Doctoral Dissertation, Riau University*.
- Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2010 tentang Pengawasan Ketenagakerjaan.
- Undang-Undang Nomor 18 tahun 2011 tentang Komisi Yudisial.
- Wardani, D. K., & Andriyani, I. (2017). Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Dan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Keandalan Pelaporan Keuangan Pemerintahan Desa Di Kabupaten Klaten. *Jurnal Akuntansi*, 5(2), 88–98.
- Yosefrinaldi. (2013). Pengaruh Kapa-sitas Sumber Daya Manusiadan Pemanfaatan TeknologiInformasi Terhadap KualitasLaporan Keuangan Pemerin-tah Daerah Dengan VariabelIntervening Sistem Pengen-dalian Intern Pemerintah(Studi Empiris Pada DinasPengelolaan Keuangan danAset Daerah Se. *Skripsi Fakultas Ekonomi.Univer-Sitas Negeri Padang.Padang*.
- Zulkardi, Z., Putri, R. I. I., & Wijaya, A. (2020). Two decades of realistic mathematics education in Indonesia. In *International Reflections on the Netherlands Didactics of Mathematics*, Springer, Cham, 325–340.

